

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan Internasional diterima oleh semua komunitas keilmuan akademik sebagai bagian dari ilmu sosial karena perkembangan studi Hubungan Internasional semakin pesat, baik dalam konteks substansi, teori/metodologi, maupun epistemologi. Semenjak lahirnya ilmu Hubungan Internasional telah banyak kontribusi yang ditorehkan oleh studi Hubungan Internasional bagi perdamaian dunia, keamanan internasional, dan kerjasama internasional antar negara.

Hubungan Internasional ketika itu dirancang dan didesain untuk menghilangkan prasangka negatif antar negara dengan mempererat kerjasama antara negara melalui hubungan diplomatik. Artinya, perdamaian dapat diciptakan dan perang dapat dicegah apabila antar negara dapat komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik satu sama lain. Saat itu, belum ada disiplin studi yang mempelajari tentang hubungan negara dalam rangka mencegah peperangan dan menciptakan perdamaian. Dalam konteks inilah, disiplin studi Hubungan Internasional lahir di dunia dan dicetak untuk mempelajari hubungan antar negara dengan tujuan mencegah peperangan dan menciptakan perdamaian dunia.

Bermula dari Inggris (anglo saxon), ilmu Hubungan Internasional berkembang ke wilayah Eropa daratan (eropa continental), kemudian menjalar

ke Amerika Serikat (Anglo America). Di wilayah Anglo Amerika inilah, disiplin studi Hubungan Internasional mengalami masa kejayaan dan keemasan. Setelah itu, berkembang kewilayah negara-negara Dunia Ketiga, seperti Amerika Latin, Asia, dan Afrika, termasuk ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Disiplin studi Hubungan Internasional di Indonesia banyak berkembang dengan cepat di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga banyak sekali sampai dengan saat ini masyarakat umum yang belajar, menempuh studi dan mempelajari Hubungan internasional dengan menjadi mahasiswa perguruan program studi Hubungan Internasional di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan saat ini banyak sekali guru besar atau Profesor Hubungan Internasional yang lahir dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini tentu membuktikan bahwa disiplin studi Hubungan Internasional telah mendapatkan tempat di masyarakat Indonesia.

International Relations sering disingkat HI adalah nama singkatan subjek akademis Hubungan Internasional. Hubungan Internasional merupakan hubungan yang sangat kompleks karena didalamnya terlibat bangsa-bangsa yang berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Menjadi semakin kompleks karena setiap segi hubungan itu melibatkan berbagai segi lain yang koordinasinya tidak sederhana. Seluruh penduduk dunia terbagi menjadi komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global. (Dewi Triwahyuni, 2015)

Kemajuan ilmu Hubungan Internasional di Indonesia juga didorong oleh adanya interaksi antar dosen dan peneliti dari berbagai program studi Hubungan Internasional di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) yang menjadi wadah bagi semua dosen, staf pengajar, dan peneliti Hubungan Internasional untuk berdiskusi, *sharing* informasi, *sharing* pengalaman dan *sharing* pengetahuan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan studi Hubungan Internasional. Setiap tahun, AIHII melakukan semacam pertemuan atau konvensi yang mana tuan rumahnya dilakukan secara bergantian di setiap perguruan tinggi yang ada program studi Hubungan Internasionalnya.

Di tingkat mahasiswa Hubungan Internasional, terdapat wadah untuk berdiskusi dan berdialog mengenai isu-isu Hubungan Internasional dan membahas kemajuan Hubungan Internasional. Terdapat wadah seperti Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PNMHII) dan juga terdapat Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional (PSNMHII) yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya dengan tuan rumah yang dilakukan secara bergantian atau bergiliran di perguruan tinggi yang terdapat program studi Hubungan Internasional.

Dibentuk pula berbagai komunitas tematik dalam Hubungan Internasional yang menjadi ajang bagi para dosen Hubungan Internasional untuk berdiskusi, melakukan penelitian bersama, melaksanakan seminar bersama, maupun mendorong terciptanya konsorsium akademik bagi kemajuan studi Hubungan Internasional. Telah diterbitkan pula Jurnal oleh AIHII sebagai ajang diseminasi

hasil-hasil pemikiran dan hasil-hasil penelitian dalam Hubungan Internasional. Terdapat pula komunikasi intensif antar dosen melalui media sosial, membuat grup di media sosial maupun dengan komunikasi lainnya yang tentunya sangat berguna bagi kemajuan studi Hubungan Internasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh komunitas Hubungan Internasional di Indonesia, yang sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan akhir yang tentunya harus dicarikan solusi permasalahannya, supaya mampu mendukung kemajuan studi Hubungan Internasional pada masa depan. Diperlukan berbagai inovasi, kreasi, dan percikan pemikiran dari semua ilmuwan Hubungan Internasional di Indonesia untuk menciptakan “kekhasan” ilmu hubungan Internasional yang berasal dari Indonesia, yang tentunya berbeda prespektif, cara pandang, dan *mindset* nya dengan ilmuwan Hubungan Internasional dari negara lain.

Adapun studi mengenai Hubungan International meliputi banyak sektor mulai dari keamanan ( security ), politik, ekonomi, dan budaya. Secara etimologis konsep keamanan (security) berasal dari bahasa latin “securus” yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan. Sementara itu dalam ilmu Hubungan International, para sarjana Hubungan International beragumen bahwa konsep keamanan merupakan sebuah “contested concept”. Studi keamanan atau studi keamanan internasional adalah bidang ilmu yang berkembang cepat pada masa Perang Dingin dan sudah lama dianggap sebagai subbidang akademik Ilmu Hubungan Internasional. Sebagai bidang penelitian,

studi keamanan internasional berfokus pada kekerasan terorganisasi dan langkah-langkah yang dapat diambil individu dan kelompok untuk menerapkan kekerasan terorganisasi secara efektif dan melindungi diri mereka dari kekerasan terorganisasi (pengetahuan mengenai penerapan kekerasan berguna untuk melengkapi pengetahuan mengenai perlindungan dari kekerasan). Subjek penelitiannya beragam, mulai dari hal-hal mikro—jenis senjata, kemampuan, taktik, antarmuka manusia-senjata, motivasi individu dan kelompok—sampai hal-hal makro—penyebab perang, strategi nuklir, doktrin militer, belanja pertahanan, dan strategi konvensional dan tak konvensional.

Studi politik internasional adalah studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan, dan tindakan, Politik Internasional juga mencakup perhatian terhadap Sistem Internasional, *deterrence*, dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Politik Internasional menggambarkan hubungan dan respon bukan aksi namun reaksi. Politik Internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam Hubungan Internasional. Politik Internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat Internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Politik internasional seperti halnya politik domestik terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat perbedaan antara kawan dan lawan. Politik Internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas tindakan negara lain. Dengan kata lain,

politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih. Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interelasi, dan interplay antar aktor dalam lingkungannya.

Rana (2007) mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai proses yang dilalui oleh negara dalam mengelola hubungan luar negerinya, dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan nasional di segala bidang, termasuk di sektor perdagangan dan investasi, baik di tingkatan bilateral, regional maupun di level multilateral. Luasnya ruang lingkup diplomasi ekonomi, menurut Rana, menuntut partisipasi aktif tidak hanya dari aktor negara, seperti kementerian luar negeri dan kementerian perdagangan, tetapi juga dari aktor non-negara. Oleh sebab itu, kemitraan dan kolaborasi yang efektif antara aktor negara dan non-negara menjadi salah satu kunci sukses di balik pelaksanaan diplomasi ekonomi. Selain itu, luasnya ruang lingkup diplomasi ekonomi turut memengaruhi struktur organisasi pemerintahan di beberapa negara. Praktik diplomasi secara umum merupakan domain utama dari kementerian luar negeri, tetapi sebagian negara telah memodifikasi manajemen pemerintahannya dengan menempatkan bidang ekonomi dalam prioritas utama kebijakan luar negeri mereka. Menurut Rana, negara akan relatif sulit untuk mencapai sasaran dalam hubungan ekonomi luar negerinya jika harmonisasi antara urusan luar negeri dan perdagangan tidak dilakukan. Kondisi ini pun akan menyebabkan aset jaringan luar negeri pemerintah, seperti perwakilan diplomatik, tidak dapat berfungsi optimal untuk meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi. Dalam praktik diplomasi

umumnya, pemerintah menggunakan instrumen kerangka aturan kerja sama (*regulatory framework*) yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kondisi-kondisi tertentu, yang menguntungkan bagi kepentingan nasional (Rana, 2007: 6). Institusionalisasi kerja sama dengan negara- negara mitra diharapkan dapat memperluas akses pasar ekspor, menghindari hambatan- hambatan perdagangan, dan meningkatkan mobilisasi aliran investasi ke dalam negeri (Saner dan Yiu, 2001). Beberapa bentuk kerangka kerja sama yang sering digunakan diantaranya *preferential trading arrangement*, *free trade agreement*, dan *closer economic partnership*.

Tidak kalah penting, pemerintah perlu segera meningkatkan kegiatan promosi ekspor dan upaya untuk mendorong lebih banyak investasi masuk ke dalam negeri. Promosi ekspor secara umum dilakukan dalam bentuk memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada perusahaan domestik yang mencari pasar ke luar negeri. Contohnya dalam bentuk studi pasar, kunjungan delegasi bisnis dan *one-on-one business meeting*, atau berpartisipasi di pameran- pameran perdagangan internasional. Sejalan dengan urgensi promosi ekspor, perwakilan-perwakilan diplomatik berperan penting sebagai garda terdepan untuk menjajaki pasar baru bagi komoditas ekspor negaranya. Di sisi lain, upaya untuk mengundang lebih banyak investor asing membutuhkan studi awal, guna mengidentifikasi kebutuhan investasi di dalam negeri dan calon-calon investor dari luar negeri, yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kemudian rencana aksi dibuat dengan melibatkan sektor swasta terkait, seperti asosiasi bisnis dan perusahaan-perusahaan yang menargetkan investasi dari

luar negeri. Proses demikian juga dapat dilakukan untuk membantu perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi ke luar negeri (Rana, 2007).

Dari uraian tersebut dapat ditarik beberapa poin penting, yaitu kompleksitas isu dan ruang lingkup diplomasi ekonomi yang luas menuntut kolaborasi dan kerja sama antara aktor pemerintah dengan aktor nonpemerintah, khususnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan industri dan perdagangan. Keterlibatan para pelaku bisnis dalam proses perencanaan dan pelaksanaan diplomasi ekonomi, yang dipimpin oleh pemerintah, akan memperkuat koordinasi untuk mencapai target kepentingan nasional.

Efektivitas diplomasi ekonomi juga menuntut harmonisasi atau integrasi lembaga-lembaga pemerintah, yang berkaitan dengan urusan luar negeri. Beberapa negara telah mempraktikkan hal demikian, menggabungkan urusan politik dan perdagangan luar negeri. Bentuk konkret diplomasi ekonomi lainnya, yang harus segera mendapatkan perhatian pemerintah adalah kegiatan promosi ekspor dan mobilisasi aliran masuk investasi asing, serta melembagakan hubungan dengan negara lain dalam bentuk kerangka kerja sama yang dapat mengakomodasi kepentingan industri domestik.

Mengenai bagaimana kebudayaan mempengaruhi hubungan internasional, Zhu Majie menawarkan empat model sebagai berikut. *Pertama*, kebudayaan memiliki dampak yang sangat luas terhadap pencapaian (*achievements*) dari suatu negara. Kebudayaan memainkan peran penting dalam memberikan kondisi spiritual, etika dan ekonomi bagi kehidupan manusia dalam hubungan antar bangsa. *Kedua*, kebudayaan merupakan navigator dalam membuat keputusan.



Beberapa orang melihat kebudayaan sebagai analog dengan filter pengetahuan. *Ketiga*, kebudayaan adalah desainer dari struktur sosial dan ekonomi. *Keempat*, kebudayaan merupakan variabel penting dalam hubungan internasional. *Kelima*, sifat kesamaan dan saling melengkapi dari kebudayaan memberikan dasar penting bagi keharmonisan dalam hubungan internasional. Kebudayaan juga dapat disebut sebagai penguat hubungan internasional. Menurut Zhu Majie, sejak berakhirnya Perang Dingin, peranan kebudayaan dalam hubungan internasional telah berkembang pesat, diantaranya dimanifestasikan dalam aspek- aspek sebagai berikut: (1) Semakin diterimanya diplomasi HAM atau *humanitarian diplomacy* dalam praktik hubungan antar negara; (2) Pengekangan institusi-institusi internasional; (3) Intervensionisme baru yang diimplementasikan melalui sarana militer; (4) sumber daya untuk kekuatan komoditas; (5) Memperkuat ekspansi budaya.

Ada cara lain yang sangat penting di mana kebudayaan membentuk masalah-masalah internasional. Secara historis, kebudayaan itu sendiri telah menjawab bahwa ada semacam ‘sistem dunia’ (*world-system*) atau ‘masyarakat dunia’ (*world society*), dan mendukung gagasan menjangkau dunia yang lebih luas. Masyarakat yang berbeda memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai bagaimana model dari dunia ini harus dikonstruksi. Misalnya, dalam kekaisaran China kuno, berkembang sebuah sistem mengenai hubungan internasional Asia yang didasarkan yang didasarkan atas sistem upeti (*tribute system*), yang terdiri dari daerah inti yang beradab, yang dikelilingi oleh negara-negara pinggir yang terikat melalui upeti, kemudian suatu kawasan ‘liar’ yang

semakin jauh. Dalam Kristendom Barat tradisional, sebuah komunitas bangsa-bangsa Kristen dipandang sebagai basis hukum internasional dan komunitas nyata, sementara negara di luar Eropa hanya yang dianggap cocok saja yang bisa bergabung dan diterima sebagai bagian dari komunitas 'beradab' ini.<sup>23</sup> Dalam sejarah Islam juga dikenal konsep zona damai (*Dar al-Islam*) yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang berpotensi bermusuhan (*Dar al-Harb*). Baik peradaban Islam maupun Kristen sama-sama punya kecenderungan universal, berusaha untuk menjangkau semua umat manusia di seluruh dunia.

Hubungan Internasional merupakan hubungan yang melibatkan bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga diperlukan mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak negara. Kajian hubungan internasional muncul melalui proses interaksi sosial antar aktor-aktor internasional. Interaksi ini nantinya akan menggambarkan pola hubungan antara aktor-aktor internasional yang terlibat didalamnya. Dalam perkembangannya, negara merupakan aktor internasional pertama. Hingga saat ini, negara mewakili hampir semua aspek dan pola interaksi dalam hubungan internasional. Interaksi antar negara ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, ketegangan berupa konflik antar negara yang bahkan dapat berujung pada perang.

Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negaranegara di dunia. Pasca perang dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan)

meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) (Perwita dan Yani, 2005:7).

Menurut P. Anthonius Sitepu dalam bukunya Studi Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

“Hubungan internasional senantiasa berhadapan dengan manifestasi baru dalam dimensi politik internasional, yakni pola interaksi hubungan antar negara-negara. Dalam pola interaksi hubungan tersebut, terlihat berbagai kecenderungan dari negara-negara terutama negara-negara besar yang melakukan dominasi terhadap negara-negara kecil dan pada gilirannya, memberikan kesan bahwa telah terjadi sifat hubungan yang kompetitif dan ini akan berpengaruh kepada *politico interest* dan akan terus berkembang menjadi konflik” (Sitepu, 2011: 7).

P. Anthonius Sitepu mengungkapkan bahwa pola interaksi hubungan antar negara-negara cenderung melakukan dominasi terutamanya negara-negara besar ke negara-negara kecil. Dominasi ini membuat masing-masing negara bertindak untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya yang kedepannya akan berkembang menjadi konflik yang akan mungkin terjadi diantara negara-negara sekurang-kurangnya berskala regional dan berkaitan dengan seluruh dunia.

Kepentingan ini tercipta dari sebuah kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari oleh suatu *'power'* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung untuk memperoleh pengakuan dunia.

Istilah hubungan internasional secara umum dapat didefinisikan bahwa hubungan internasional itu mengacu terhadap hubungan yang terjadi antar pemerintah di dunia yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa. Berkaitan erat dengan aktor-aktor lain seperti Organisasi Internasional, korporasi

internasional dan individu-individu dengan struktur sosial yang lain mencakup ekonomi, kebudayaan dan politik domestik serta pengaruh-pengaruh geografis maupun historisnya (Goldstein, 2002: 3).

Interaksi internasional tidak saja terjadi oleh satu interaksi tetapi oleh beberapa interaksi dari negara-negara lain dalam memperjuangkan kepentingan nasional dari negaranya masing-masing. Bila suatu aktor negara melakukan suatu hubungan dalam dunia internasional, negara tersebut melakukan sebuah interaksi yang disebut Interaksi Internasional. Pola interaksi ini didasarkan karena adanya hubungan antara negara dengan dunia internasional dimana negara tersebut perlu mengakomodasi kepentingan-kepentingannya di lingkup internasional tersebut.

Dalam interaksi internasional, terbentuk suatu interaksi yang berdasarkan kepada banyaknya pihak yang melakukan hubungan tersebut, antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral atau internasional. Pola-pola yang terbentuk dalam proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan dari pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut, yang dapat dibedakan menjadi sebuah pola kerjasama, pola persaingan, dan pola konflik (Perwita dan Yani, 2005 : 42).

Perkembangan ilmu hubungan internasional saat ini adalah sebagai ilmu yang mandiri (*a real distinct dicipliner*), kemandirian ini yang menjadikan ilmu hubungan internasional menjadi “*new comer*” dalam ilmu sosialn lainnya, usaha dalam memunculkan kemandirian ini merupakan suatu proses keilmuan yang panjang. (Darmayadi, 2015 : 10).

### **2.1.2 Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan mencapai kepentingan nasional negara tersebut dalam percaturan dunia internasional. Politik luar negeri merupakan bagian dari strategi politik nasional suatu negara yang berbeda dengan politik luar negeri negara lain.

Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri suatu negara, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif, seperti kebijakan untuk menentukan suatu strategi (Suryokusumo, 2004:7-8).

Dengan demikian hubungan internasional adalah sebuah forum interaksi dari berbagai kepentingan-kepentingan nasional. Dalam interaksinya, setiap negara berupaya menegakan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam forum interaksi masyarakat internasional yakni dengan melalui kebijaksanaan politik luar negeri masing-masing negara.

Dalam menjalankan politik luar negeri, hubungan internasional menjelaskan beberapa pendekatan, yang salah satunya adalah pendekatan pemikiran strategis suatu negara atau pendekatan adaptif, salah satu tokoh pemikirnya adalah James N. Rosenau. Berkaitan juga dengan politik luar negeri yang dirumuskan oleh Perancis berdasarkan keadaan geopolitik Indonesia. Bahwa menurut teoritis pendekatan ini lingkungan akan menimbulkan akibat-akibat khusus, terlepas dari tindakan apa yang dilakukan oleh negara tersebut, model ini akan memisahkan perkiraan kapabilitas yang dimiliki oleh sebuah negara dengan posisi geopolitiknya, keadaan geografis dan sebagainya. Menurut Rosenau politik

luar negeri merupakan suatu mekanisme interaksi negara-negara dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Kondisi sebuah negara akan mempengaruhi politik luar negerinya. Negara yang memiliki lingkungan strategis pasti akan memiliki politik luar negeri yang berbeda, begitu juga dengan keadaan negara tujuan dimana politik luar negeri tersebut dilaksanakan, akan mempengaruhi perumusan politik luar negeri negara lain (Perwita & Yani, 2005: 62-63).

Politik luar negeri suatu negara ditunjukkan untuk memajukan dan melindungi kepentingan negara itu. Fungsi utama diplomasi juga, adalah untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Dari situlah maka politik luar negeri dan diplomasi memiliki fungsi yang sama. Namun ada beberapa perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Di dunia yang terdiri dari banyak bangsa ini, untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional, setiap bangsa harus menentukan sikapnya terhadap bangsa lain dan arah tindakan yang akan diambil dan dicapai dalam urusan internasional. Pada saat dasar ini diletakan dan politik luar negeri dirumuskan, maka munculah peranan diplomat untuk melaksanakan keputusan itu dengan kegiatan-kegiatannya. Jadi apabila fungsi utama politik luar negeri adalah mengambil keputusan mengenai hubungan luar negeri maka tugas utama diplomasi adalah untuk melaksanakannya dengan baik dan efektif (Roy, 1991:34)

### **2.1.3 Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk

menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

“Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara” (Rudy, 2002: 116).

Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan atau politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi suatu negara, karena mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, kesejahteraan dan ekonomi (Plano & Olton, 2000: 7)

Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung selama tercapainya kepentingan-kepentingan negaranya. Kepentingan-kepentingan negara tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu ruang lingkup domestik saja, akan tetapi melalui kerangka hubungan antar negara. Ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat ideal dari tujuan-tujuan nasional yang harus ditemukan sebagai dasar dari hubungan luar negeri dan politik luar negeri negara tersebut. Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan

serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional (Plano & Olton,2000: 7).

Isu kebudayaan sebagai instrumen dalam menjalankan diplomasi tengah menjadi fenomena global yang menjadi perhatian bagi berbagai negara dalam upaya memenuhi kebijakan dan sikap negara lain dalam menjalankan suatu kepentingan nasional dengan lebih efisien. (Leonardo,2019:4)

#### **2.1.4 Diplomasi**

Diplomasi merupakan suatu istilah yang memiliki pengertian berbeda bergantung dari pengguna dan penggunaannya. Dalam dunia politik, diplomasi mengacu pada proses komunikasi antara aktor-aktor internasional yang berusaha menyelesaikan konflik atau permasalahan melalui proses negosiasi (Brian, 2005).

Kadang kala istilah diplomasi disamakan dengan hubungan internasional atau masalah-masalah dunia (*international relations and world affairs*), hubungan-hubungan luar negeri (*foreign relations*), cara melakukan hubungan luar negeri (*conduct of foreign relations*), implementasi politik luar negeri (*implementation of foreign policy*), komunikasi (*officials communications*) dan negosiasi (*negotiation*). Diplomasi sering dipandang sebagai suatu identitas dari hubungan internasional, tetapi perhatiannya lebih ditekankan pada kejadian-kejadian atau penyebab peristiwa, kebijakan, hasil politik dan lain lain sehingga pemahamannya tidak dapat disejajarkan dengan hubungan internasional secara menyeluruh. Jika dianggap diplomasi itu sejajar dari hubungan luar negeri,



hubungan-hubungan itu memiliki dua komponen yaitu kebijakan luar negeri dan tatacara hubungan luar negeri.

Diplomasi lebih dekat kepada tatacara hubungan luar negeri (*conduct of foreign policy*) dari pada kebijakan luar negeri (*foreign policy*). Diplomasi dianggap sebagai implementasi kebijakan luar negeri yang mengandung pengertian bahwa maksud dari diplomasi adalah bukan pada kebijakannya atau pembuat kebijakan tersebut. Diplomasi adalah metode utama yang membuat suatu politik luar negeri dijalankan, suatu cara dan prosedur negara-negara bangsa untuk melakukan urusan politik dan urusan lain mereka pada masa damai (Wijatmadja, 2016: 147).

Diplomasi dapat dipahami dalam dua perspektif besar pada kaitannya dengan politik dunia. Perspektif pertama yaitu perspektif makro. Perspektif makro mencoba untuk memahami politik dunia secara keseluruhan, apa saja bagian-bagian penyusunnya, dan bagaimana mereka dapat tersusun bersama-sama. Melalui perspektif makro diplomasi dipandang secara umum sebagai hubungan negara dan sebagai proses global. Sedangkan yang kedua dalam perspektif mikro, diplomasi dipahami sebagai wawasan perilaku aktor dalam sistem global. Diplomasi lebih didefinisikan sebagai instrument kebijakan dalam mencapai kepentingannya dibandingkan sebagai proses global.

Melalui peran media massa, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa sebuah halangan birokratis. Peran media massa telah menegaskan ide “diplomasi tanpa diplomat”. Perkembangan lain adalah peranan media massa dalam mengatur

mekanisme diplomasi. Media sering kali dianggap sebagai sebuah penunjang maupun sebuah penghambat (Surya, 2011: 58).

Media dan opini publik merupakan suatu hal yang penting dalam urusan-urusan Internasional dan menjadi intensif bagi para pemimpin untuk semakin memperlihatkan diri di depan konstituennya sebagai bagian dari upaya propaganda. Diplomasi pada tingkat tertinggi ini semakin dipolitisasi dimana parlemen menginginkan informasi mengenai kebijakan luar negeri secara rinci (Surya, 2011 : 52).

Diplomasi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan merupakan sebuah langkah penting bagi negara, yang dikaitkan dengan implementasi hukum internasional. Pada kenyataannya pengakuan oleh sebuah negara merdeka lebih banyak dilandasi alasan politik.

Diplomasi memiliki kaitan erat dengan politik luar negeri karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih (Djelantik, 2008 : 13). Diplomasi dalam pengertian yang khusus didefinisikan sebagai *sense used international relations it is the art of negotiation in order to achieve the maximum of group objectives with a minimum of cost,, with in a system of politics in which is a possibility* (diplomasi dalam hubungan internasional merupakan seni dalam bernegosiasi untuk mencapai tujuan kelompok secara maksimal dengan biaya minimum) (Sitepu, 2011 : 198). Praktek diplomasi masa kini secara garis besar dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti, revolusi teknologi informasi, meningkatnya peran media massa, globalisasi bisnis dan keuangan yang menyebabkan aktivitas

diplomasi ekonomi menjadi makin signifikan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hubungan internasional, dan juga karena munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional seperti trans organized crime, terorisme, lingkungan hidup, HAM dan masalah lainnya (Djelantik dalam Hermawan, 2007 : 59).

Diplomasi merupakan praktik dalam komunikasi antarnegara dan merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam buku Shoelhi yang berjudul *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*, dipaparkan mengenai macam-macam diplomasi (Shoelhi, 2011 : 81-88), diantaranya:

1. Diplomasi Preventif

Merupakan diplomasi yang dilakukan ketika masyarakat menghadapi situasi genting yang akan memunculkan konflik besar atau perang.

2. Diplomasi Demokratis

Merupakan diplomasi yang harus dijalankan secara terus terang dan terbuka serta mendapatkan pengawasan penuh dari publik

3. Diplomasi Kebudayaan

Merupakan diplomasi yang menggunakan kebudayaan sebagai sarana untuk memperlancar hubungan internasional. Untuk alasan memperlancar hubungan tersebutlah sejak dahulu para diplomat memperkenalkan kebudayaan pada masyarakat internasional dengan tujuan untuk mempengaruhi atau memperbaiki sikap dan pandangan mereka terhadap negaranya. Menurut Kartini Sabekti (dalam Shoelhi, 2011 : 88). kebudayaan merupakan sarana penunjang yang ampuh bagi diplomasi dan dapat menumbuhkan saling pengertian, bahkan dapat

menjembatani pandangan-pandangan yang berbeda. Diplomasi kebudayaan bisa diimplementasikan dalam bentuk berbagai festival internasional mengenai kebudayaan, seperti misalnya festival musik, festival tari dari berbagai daerah; pameran benda-benda tradisional bersejarah, barang-barang antik serta perhiasan, pagelaran seni rupa, pertunjukan teater dan film; serta bazar makanan tradisional. Acara Festival-festival seperti itu selalu dapat menarik minat sebagian besar khalayak massa di negara akreditasi tempat diplomat bertugas. Melalui festival itu, terjadilah interaksi aktif antarmanusia dan antarbangsa, dan interaksi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menunjang berbagai kegiatan diplomasi.

#### 4. Diplomasi Ekonomi

Merupakan bentuk diplomasi untuk menanamkan pengaruh melalui sarana bantuan ekonomi sebagai sarana utamanya. Diplomasi ini juga dikenal dengan sebutan shop keeper diplomacy. Globalisasi telah mendorong praktik diplomasi ekonomi sehingga saat ini hampir seluruh negara-negara di dunia menggunakan diplomasi ekonomi untuk memperoleh kepentingan nasionalnya.

Tujuan utama suatu negara mengadakan hubungan diplomasi adalah mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara lain, menjaga hubungan dengan negara lain dan menjaga keserasian antar negara. Diplomasi pada hakekatnya merupakan cara-cara dimana negara melalui wakil-wakil resmi maupun wakil-wakil lainnya termasuk juga para pelaku-pelaku lainnya membicarakan dengan baik, mengkoordinasikan dan menjamin kepentingan-kepentingan tertentu atau yang lebih luas melalui surat menyurat, pembicaraan secara pribadi, dengan

mengadakan pertukaran perdagangan, pendekatan, kunjungan-kunjungan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan lainnya (Suryokusumo, 2004:34).

#### **2.1.4.1 *Soft Power Diplomacy***

*Soft Power* yang dimiliki oleh suatu negara, pada dasarnya bergantung pada tiga sumber utama, yakni: budaya, nilai-nilai politis, dan terakhir kebijakan luar negeri. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dan kebiasaan (pratek) yang mempunyai arti bagi sebuah masyarakat. Budaya mempunyai banyak manifestasi, dan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *high culture* yang diperuntukan bagi masyarakat secara umum. Apabila budaya suatu negara memiliki nilai universal serta mempromosikan *values* dan *interest* yang di-*share* bersama, maka budaya tersebut dapat meningkatkan *desired outcomes*-nya karena daya tarik yang tercipta (Nye, 2004: 73).

Konsep soft power pertama kali diperkenalkan oleh Joseph S. Nye di tahun 1990. Konsep power sendiri menurut Nye adalah kemampuan dalam hal mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Terdapat tiga cara dalam mengeksekusi *power*, yaitu: memaksa lewat ancaman, membujuk dengan memberikan bayaran, atau yang terakhir dengan menarik perhatian atau memikat hati. Dua yang pertama dinamakan *hard power*, yakni ditandai dengan penggunaan kekuatan militer maupun ekonomi, sedangkan yang ketiga disebut dengan *soft power*. Nye mendefinisikan *soft power* sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain dengan cara memunculkan ketertarikan (*attraction*) dibandingkan melakukan paksaan (*coercion*) atau

bayaran (*payments*). *Soft power* ini terletak pada kemampuan suatu pihak dalam membentuk preferensi pihak lain (Nye, 2004: 46).

Mempromosikan image positif suatu negara bukanlah sesuatu yang baru. Namun di era sekarang, kondisi untuk merancang sebuah soft power telah mengalami transformasi, begitu juga dengan konteks internasional yang telah berubah dengan revolusi informasi dan globalisasinya. Nye berargumen bahwa konteks sangat menentukan dampak dan hasil suatu soft power, terlepas dari sumber mana soft power tersebut berasal. Dan memang dibandingkan dengan hard power, soft power lebih banyak bergantung pada konteks, dan terhadap adanya kemauan dari sang penerima (*receiver*). Oleh karenanya, soft power tidaklah konstan, namun sesuatu yang dapat berubah-ubah berdasarkan waktu, tempat, dan kondisi (Nye, 2004: 51).

#### **2.1.4.2 Diplomasi Publik**

Diplomasi publik merupakan kunci dalam implementasi apa yang disebut dengan *Soft Diplomacy* menjadi alat utama diplomasi sekarang ini. Perkembangan diplomasi di era globalisasi menjadikan Diplomasi Publik itu sendiri semakin beragam. Kecenderungan pelaksanaan Diplomasi Publik dengan menggunakan aplikasi *Soft Diplomacy* dianggap efektif dan efisien karena mudah untuk dilakukan tanpa menelan korban dan menghabiskan biaya besar. Seiring berubahnya paradigma aktor hubungan internasional, pelaksanaan Diplomasi Publik melibatkan berbagai kalangan aktor non-pemerintah. Oleh karena itu, *Soft Diplomacy* merupakan bentuk nyata dari penggunaan instrumen selain tekanan

politik, militer dan tekanan ekonomi, salah satunya yakni dengan mengedepankan unsur budaya dalam kegiatan diplomasi (Yudhantara, 2011:183).

Diplomasi publik '*second track diplomacy*', didefinisikan sebagai upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen non-government secara tidak resmi (*unofficial*). Dalam hal ini *second track diplomacy* bukan berarti bertindak sebagai pengganti *first track diplomacy*, akan tetapi turut melancarkan jalan bagi negosiasi. Selain itu peranan *second track diplomacy* ini juga untuk melancarkan persetujuan yang dilaksanakan oleh *first track diplomacy*, dengan cara mendorong para diplomat untuk memanfaatkan informasi penting yang diperoleh pelaku-pelaku *second track diplomacy*.

Menurut John W. McDonald (2012) dalam *Journal Conflictologi : The Institut for Multi-track Diplomacy* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, *Multi-track diplomacy* terdiri dari sembilan jalur yaitu sebagai berikut :

1. *Track 1* - Pemerintah, atau Perdamaian melalui Diplomasi. Menyangkut pendekatan diplomasi resmi, perumusan kebijakan, dan perdamaian.
2. *Track 2* - Non-Pemerintah/Professional, Perdamaian melalui Resolusi Konflik.
3. *Track 3* - Bisnis, atau Perdamaian melalui Perdagangan.
4. *Track 4* - Private Citizen, melalui Keterlibatan Perdamaian warga negara sipil.
5. *Track 5* - Penelitian, dan Pendidikan, atau perdamaian melalui Pembelajaran, jalur ini mencakup: penelitian, seperti yang terhubung ke program universitas, pola pikir, dan minat khusus pada pusat penelitian.
6. *Track 6* - Aktivisme, atau Perdamaian melalui Advokasi.

7. *Track 7* - Agama, atau Perdamaian melalui Iman dalam tindakan.
8. *Track 8* - Pendanaan, atau Perdamaian melalui Pemberian Resources.
9. *Track 9* - Komunikasi dan Media, atau Perdamaian melalui Informasi.

Sistem ini mengharuskan semua track untuk akhirnya bekerja sama untuk membangun sebuah proses perdamaian yang akan berlangsung, itu merupakan transisi dari track 1 untuk melacak 2 sulit dicapai, menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi organisasi (Diamond, 2012:67-68).

Empat dari sembilan track tersebut yang digunakan Amerika Serikat dalam melakukan diplomasi kebudayaannya di Indonesia, dimulai dengan adanya negosiasi dalam pencapaian kerjasama bilateral, privat citizen, pendanaan yang diberikan Amerika Serikat dan juga komunikasi serta media yang membantu Amerika Serikat dalam melancarkan diplomasi kebudayaannya.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Hubungan Internasional mencakup interaksi yang dilakukan oleh aktor suatu negara dalam kehidupan antarnegara. Adanya saling ketergantungan dari kedua negara Amerika Serikat dan Indonesia mendorong adanya kerjasama, hendaknya kerjasama tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain karena dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya, salah satunya Amerika Serikat. Kepentingan nasional Amerika dalam bidang budaya diantaranya adalah untuk menyebarkan kebudayaan, memperbaiki image dan menyebarkan values-nya di dunia. Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya tersebut, Amerika Serikat menjadikan Kultur



Hip Hop sebagai diplomasi budayanya untuk memenuhi kepentingan nasional nya tersebut.

Diplomasi yang dilakukan Amerika Serikat melalui Kultur hip hop termasuk kedalam diplomasi publik. dalam diplomasi publik yang menjadi subjek dan objek nya adalah publik atau masyarakat secara umum, dimana peran publik atau individu lebih dominan apabila dibandingkan dengan peran pemerintah. Dan diplomasi publik pun merupakan kunci dalam implementasi apa yang disebut dengan soft power. Melalui Budaya, Amerika serikat dan Indonesia menjalankan praktek diplomasi budaya, dimana Amerika Serikat menyebarkan ide, informasi, seni, serta aspek kebudayaan lainnya.

**Gambar 2.1**  
**Alur Kerangka Pemikiran**

